

DIMENSI RUANG DAN SOSIAL DALAM INDUSTRIALISASI PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG INDONESIA TAHAP KEDUA

Oleh Bambang Bintoro Soedjito

Dinamika ekonomi global dan proses industrialisasi di ASEAN dan Indonesia pada khususnya telah membawa dampak transformasi struktur sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya juga sangat mempengaruhi pada struktur tata ruang. Hal tersebut perlu dilihat sebagai suatu dimensi (issue) dalam perencanaan pengembangan wilayah dan kota di Indonesia.

Pendahuluan

Dalam dekade 1980-1990, penduduk perkotaan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat: dari 32,8 juta menjadi 55,4 juta, yang berarti laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,36% per tahun (BPS, 1991: hal. 10). Laju pertumbuhan tersebut lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk perkotaan dalam dekade 1970-1980 yang besarnya 4% per tahun (NUDS, 1985: 70). Proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan juga mengalami perubahan cukup cepat, dari 19,4% pada tahun 1971 menjadi 22,3% dan 30,9% untuk tahun 1980 dan tahun 1990. Menurut perkiraan NUDS pada tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 80,4 juta atau 38,3% dari jumlah penduduk Indonesia (NUDS, 1985: 114). Andaikata kecenderungan laju pertumbuhan ini diikuti maka pada akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua penduduk yang berdiam di daerah perkotaan akan mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Besar kemungkinan sumbangan produktif dari ekonomi perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto dapat mencapai lebih dari 50%.

Perspektif tersebut mengisyaratkan akan terjadinya proses transformasi yang cepat selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua yaitu dari struktur sosial ekonomi yang berorientasi kepada wilayah pedesaan ke struktur

sosial ekonomi yang beorientasi kepada wilayah perkotaan. Dua faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perkotaan yang cepat tersebut adalah :

1. Kebijakan makroekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui industrialisasi yang berorientasi ekspor,
2. Daya tarik kota bagi lokasi kegiatan usaha karena adanya ekonomi skala besar dan ekonomi aglomerasi yang menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi khususnya dalam bidang finansial, fiskal dan sektor riil mempunyai dampak yang langsung terhadap ekonomi perkotaan. Namun di lain pihak, kinerja ekonomi perkotaan juga mempengaruhi kinerja makroekonomi.

Jika kebijakan makro ekonomi untuk jangka panjang mengikuti kecenderungan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui industrialisasi yang dipercepat dengan memanfaatkan peluang-peluang yang diciptakan oleh dinamika globalisasi ekonomi, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut pertama-tama yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah karakteristik proses industrialisasi yang melanda negara-negara berkembang tertentu, termasuk ASEAN dan khususnya Indonesia, dalam konteks ekonomi dunia. Selanjutnya, perlu dikaji dampak proses industrialisasi tersebut terhadap transformasi

• Tulisan ini merupakan penyempurnaan dari makalah yang disampaikan pada Musyawarah Antar Kota Seluruh Indonesia (MAKSI) X yang diselenggarakan Badan Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) di Jakarta, 17-19 Juli 1991, berjudul "Strategi Perkotaan Nasional dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua: *Beberapa Pokok Isyu Kebijakan*".

• **Bambang B. Soedjito**, adalah Staf Pengajar Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB dan Kepala Biro Regional II pada Deputy V Bappenas.

struktur sosial ekonomi serta dimensi ruang dari proses restrukturisasi sosial-ekonomi yang terjadi. Bagian akhir dari tulisan ini akan mencoba menemukan beberapa isu pokok yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijaksanaan perkotaan dalam konteks pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Dinamika Ekonomi Global dan Proses Industrialisasi

Industrialisasi baru yang dialami oleh ASEAN, khususnya Indonesia, terjadi dalam suatu konteks yang global bercirikan tiga proses historik yang berkaitan satu sama lain (Castells, 1989: 7-9), yaitu :

- (a) Terbentuknya satu ekonomi dunia yang bekerja sebagai satu kesatuan dalam waktu nyata. Ekonomi nasional negara-negara di dunia terhubung dalam suatu struktur interaksi yang mempengaruhi proses sosial ekonomi masyarakat bangsa. Sebagian mampu memanfaatkan hubungan dengan pusat-pusat ekonomi dunia tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, namun pertumbuhan ekonomi seperti itu sangat ditentukan oleh ciri spesifik dari hubungan yang terjadi, dan akan dibentuk oleh dinamika pusat-pusat ekonomi dunia tersebut. Satu kecenderungan penting dalam dinamika tersebut adalah tumbuhnya banyak kutub-kutub yang berfungsi sebagai pusat-pusat sistem ekonomi dunia yang sedang dalam proses menuju integrasi ekonomi sepenuhnya.
- (b) Revolusi teknologi yang terstrukturkan di sekitar kemajuan pesat teknologi informasi. Revolusi teknologi ini memberikan dukungan sarana bagi terbentuknya ekonomi dunia baru yang mampu melakukan fungsinya dengan bantuan basis sistem baru prasarana telekomunikasi dan transportasi, dan yang dikelola melalui sistem informasi yang interaktif. Kemampuan teknologi merupakan persyaratan dasar agar dapat berprestasi dalam ekonomi dunia. Bagi negara-negara yang mempunyai akses yang baik kepada perkembangan mutakhir sains dan teknologi, kesempatan baru sangat terbuka untuk terlibat dalam upaya untuk melakukan lompatan teknologikal.
- (c) Terjadinya proses restrukturisasi sosial ekonomi di pusat-pusat ekonomi dunia melalui proses desentralisasi produktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di negara-negara inti menuju kawasan dunia lainnya yang mempunyai biaya produksi lebih murah dan iklim regulasi yang lebih luwes.

Dalam konteks ini, ada tiga mekanisme pokok yang menjadi ramuan dasar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu :

- (a) Eksistensi suatu ekonomi dunia yang relatif terbuka dimana ekonomi nasional yang berorientasi ekspor menikmati keunggulan komparatif, terutama dalam hal perbedaan antara struktur biaya produksi dan tingkat harga barang-barang di pasar negara-negara maju. Penting untuk disadari bahwa kesempatan bagi industrialisasi baru di negara yang sedang berkembang sangat erat kaitannya dengan ekspansi yang berkelanjutan dari pada ekonomi negara-negara inti dan terhadap peranan perdagangan internasional yang meningkat dalam proses ekspansi tersebut (Amin, 1974; Wallerstein, 1979).
- (b) Peran aktif pemerintah nasional dalam mendorong dan mengarahkan pembangunan ekonomi. Jadi, meskipun suatu ekonomi pasar terbuka pada tingkat internasional memberikan kesempatan bagi industrialisasi, keberhasilan proses industrialisasi kelihatannya secara langsung berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan suatu strategi yang efektif untuk bersaing di arena internasional (Friedmann and Weaver, 1979).
- (c) Perusahaan multinasional juga telah memainkan peranan yang penting dalam proses industrialisasi baru, baik melalui lokasi pabrik-pabriknya di negara-negara ASEAN ataupun melalui fungsi mereka sebagai perantara antara perusahaan lokal dengan pasar dunia. Peran yang efektif dari perusahaan multinasional terjadi bila mereka berhadapan dengan pemerintahan yang kuat yang mengemukakan berbagai persyaratan bagi keberadaan mereka di negaranya (Barnett and Muller, 1974).

Dalam proses industrialisasi baru yang melibatkan sektor industri modern, perlu disadari dan dipahami keberadaan ekonomi informal yang menyerap kelebihan tenaga kerja dan menyediakan aneka kebutuhan barang konsumsi yang murah dan jasa pelayanan yang luwes (Bromley, 1978). Ekonomi informal bukan dimaksudkan sebagai sektor marginal, melainkan sebagai bagian penting dari sistem produksi dan distribusi yang terartikulasikan secara erat dengan sektor ekonomi modern dan berorientasi ekspor, sebagai subkontraktor sistem produksi maupun sebagai penyedia jasa pelayanan dan barang konsumsi bagi para pekerja di sektor modern.

Dampak Industrialisasi Baru Terhadap Struktur Sosial

Proses industrialisasi secepat seperti yang dialami Indonesia akan sangat mempengaruhi transformasi struktur sosial. Munculnya struktur kelas yang baru dimana pekerja industri dan tenaga profesional kelas

menengah menjadi pelaku sosial utama. Migrasi desa-kota yang terpusatkan di beberapa kota tertentu terutama kota-kota besar seringkali tanpa disertai dengan kesempatan untuk memperoleh akses ke perumahan yang layak dan pelayanan dasar perkotaan. Proses industrialisasi pada umumnya meningkatkan mutu kehidupan, tetapi juga menciptakan kondisi bekerja yang keras dan seringkali memberikan upah yang terlalu rendah bagi para pekerja yang umumnya kaum migran untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup di daerah perkotaan.

Pola baru industrialisasi ini cenderung mendorong terjadinya polarisasi dan dualisasi dalam masyarakat bangsa (Lo and Shalih, 1975). Dinamika dari pada proses baru industrialisasi dan keragaman sumber-sumber yang terlibat (pemerintah, multinasional dan perusahaan lokal yang berorientasi ke pasar dunia) telah melibatkan didalamnya sejumlah penduduk, meskipun jumlah tersebut belum mewakili mayoritas penduduk. Berdampingan dengan tenaga profesional kelas menengah dan kelas pekerja industri yang baru muncul sebagai akibat keterlibatan mereka dalam proses industrialisasi tersebut, mayoritas penduduk pedesaan dan penduduk papan bawah perkotaan yang cukup besar jumlahnya tidak terjangkau oleh berbagai manfaat yang dihasilkan oleh proses tersebut dan bahkan kemungkinan besar tidak mempunyai prospek untuk terintegrasi di masa depan. Sebagian dari tenaga kerja ini yang tidak terserap oleh sektor modern terlibat dalam kegiatan ekonomi informal yang langsung bermanfaat bagi sektor modern, tetapi bagian terbesar masih tidak termasuk kedalam sektor masyarakat yang dinamik yang terintegrasi secara penuh dengan sistem ekonomi dunia. Dengan demikian proses baru industrialisasi disatu pihak membuat masyarakat bangsa lebih dinamik, lebih mampu dan berada, dan lebih terartikulasikan dengan perkembangan dan kemajuan dunia, di lain pihak juga memperbesar kemungkinan terabaikannya secara struktural sebagian besar penduduknya ke dalam proses transformasi tersebut.

Dampak lain terhadap struktur sosial adalah kecenderungan semakin pentingnya peranan wanita dalam pembentukan kelas pekerja baru (Moon and Koo, 1983). Meningkatnya wanita pekerja memasuki pasar tenaga kerja tidak terbatas hanya pada kegiatan manufaktur tetapi juga pada jasa pelayanan baik di sektor formal maupun informal. Mobilisasi tenaga kerja wanita dalam proses industrialisasi dewasa ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap tatanan sosial yang sudah mapan yaitu berupa potensi konflik sosial dan tantangan terhadap fragmentasi organisasi sosial yang tradisional. Berbeda dengan negara-negara maju,

Indonesia yang mempunyai tradisi sistem keluarga patriarkal yang kuat mungkin akan memunculkan gerakan sosial baru yang lebih berdasarkan pada ukuran moral atau kultural dari pada ukuran konflik kelas atau konflik gender.

Dimensi sosial lainnya dari proses industrialisasi baru adalah adanya interaksi yang rumit dari proses tersebut dengan keragaman etnik, agama dan struktur keanekaragaman masyarakat Indonesia. Interaksi ini pada dasarnya akan mengakibatkan terjadinya segmentasi struktural antara subkultur yang beridentitas lokal dan kultur asing yang modern, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan berkurangnya komunikasi antara kelompok sosial yang berbeda maupun antara setiap kelompok dengan kelompok elit yang dominan yang terkait erat dengan sistem global. Kemungkinan yang terburuk adalah terjadinya desintegrasi mekanisme koeksistensi sosial.

Dampak Transformasi Struktur Sosial-Ekonomi Terhadap Tata Ruang

Dampak terhadap tata ruang dari transformasi sosial-ekonomi sebagai akibat dari proses industrialisasi baru, selain mengakibatkan kesenjangan perkotaan (desa vs kota) dan regional (daerah lebih maju vs daerah kurang berkembang), muncul pula bentuk baru dari polarisasi dan kesenjangan spasial (Lo dan Shalih, 1975). Dalam konteks struktur tata ruang nasional, pusat-pusat yang dominan, terutama kota-kota utama, terhubung secara baik dengan pusat-pusat kegiatan di seluruh dunia, melalui penggunaan prasarana teknologikal mutakhir yang disediakan oleh sistem telekomunikasi, informasi dan transportasi udara yang maju dan canggih. Pusat dominan ini sangat potensial untuk menjadi salah satu dari kota-kota dunia (*world cities*) yang berukuran mega atau metropolitan. Jakarta, Surabaya dan mungkin Medan dapat menjadi kota-kota dunia. Selain itu kota-kota dalam ukuran yang lebih kecil tapi menjadi lokasi istimewa bagi sektor-sektor dinamik yang produksi dan manajemennya berorientasi internasional, juga akan terlayani dengan berbagai kemudahan sistem, sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi dan informasi, dan terorganisasikan dalam jaringan sistem kota-kota yang secara langsung dapat berhubungan dengan sistem ekonomi dunia.

Pada sisi ekstrim yang lain akan ditemui wilayah dan kota-kota yang secara fungsional tidak terintegrasi ke dalam sistem baru (yang dihasilkan oleh proses industrialisasi baru), yang di satu pihak terus akan berada

dalam kondisi terisolasi, namun di lain pihak akan mengalami penetrasi kultural dan politik yang semakin meningkat. Namun kenyataan obyektif menunjukkan bahwa diantara kedua peningkatan ekstrim ini ditemui banyak kota yang mempunyai fungsi dan orientasi terhadap sistem global dengan rentang derajat yang berbeda yang perlu diorganisasikan dalam satu struktur tata ruang nasional yang utuh.

Transformasi struktur sosial-ekonomi ini juga akan mengakibatkan polarisasi dan kesenjangan spasial terhadap tata ruang internal perkotaan. Pemanfaatan ruang perkotaan yang terwujud akan mencerminkan struktur sosial yang terpolarisasi dan tersegmentasi oleh proses industrialisasi baru. Di satu sisi ruang formal yang mengakomodasikan kebutuhan ruang dari kelompok dominan diorganisasikan melalui transaksi real-estate, seringkali mempunyai fasilitas eksklusif dan seringkali dilengkapi dengan sistem pengamanan lingkungan dengan mempekerjakan satpam. Di sisi lain, ruang informal yang didiami oleh masyarakat bawah, lokasinya tersebar pada permukiman padat yang seringkali tidak terjangkau oleh pelayanan dasar perkotaan, dan yang seringkali masyarakat penghuninya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pemilikan tanah dan perumahan, sehingga sewaktu-waktu dapat digusur. Selain itu dalam upaya pembangunan wilayah perkotaan, pemerintah kota juga dihadapkan kepada kesulitan untuk mendapatkan lahan atau ruang untuk meletakkan berbagai sarana dan prasarana publik.

Beberapa Pokok Isyu Kebijakan

Dalam konteks proses industrialisasi baru yang akan dihadapi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, pemerintah semakin dihadapkan kepada persoalan dilematik antara kebutuhan untuk berperan sebagai agen global dalam perkembangan dunia yang semakin menyatu dan kebutuhan untuk memperkuat dan melestarikan kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari kelompok sosial dan etnik yang anekaragam yang tersegmentasikan kedalam kelompok yang terlibat dalam proses yang seringkali tereksplotasi dan kelompok yang sama sekali tidak terlibat (irrelevant terhadap proses industrialisasi tersebut). Dilema ini dapat mengakibatkan timbulnya dua macam krisis :

- (a) krisis legitimasi (pemerintah vs rakyat), dan
- (b) krisis manajemen (pemerintah vs mitra dalam kompetisi global ekonomi dunia).

Satu isyu penting yang erat kaitannya dengan krisis legitimasi adalah isyu pembangunan politik (Meier, 1991). Urbanisasi membawa akibat semakin

meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat perkotaan, karena investasi sumberdaya manusia bagi masyarakat perkotaan lebih ekonomis. Dengan semakin terdidiknya masyarakat perkotaan komunikasi tentang berbagai hal akan lebih mudah terjadi sehingga berbagai kelompok sosial dengan aneka ragam minat dan kepentingan akan tumbuh. Untuk menciptakan koalisi yang stabil diperlukan sistem politik yang demokratis. Demokratisasi ini membutuhkan sistem pemerintahan perkotaan yang dikelola secara terbuka.

Ada tiga pokok kebijaksanaan perkotaan yang berhubungan dengan krisis manajemen, yaitu (1) isyu tentang produktivitas perkotaan, (2) isyu tentang penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan, dan (3) isyu tentang pengelolaan sumberdaya dan lingkungan hidup perkotaan (World Bank, 1990).

Kebijakan makroekonomi melalui percepatan industri- alisasi akan semakin meningkatkan peranan dan kontribusi ekonomi perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto. Meningkatnya peran ekonomi perkotaan membutuhkan upaya yang lebih besar baik dari ukuran efisiensi maupun pemerataan untuk membuatnya lebih produktif. Produktivitas perkotaan dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi dan sektoral. Meskipun pengelolaan makroekonomi yang lebih baik merupakan kondisi yang diperlukan tapi hal itu belum cukup bagi peningkatan produktivitas perkotaan. Dimensi ruang dari ekonomi perkotaan, yaitu ekonomi skala dan ekonomi aglomerasi baik yang positif maupun yang negatif perlu dipertimbangkan. Kendala pokok seperti kekurangan prasarana, peraturan perundangan yang membatasi beroperasinya mekanisme pasar khususnya bagi penyediaan lahan dan perumahan, lemahnya kelembagaan dan kurangnya dana bagi pembangunan kota, semua ini berpengaruh terhadap dimensi ruang dan membatasi produktivitas kegiatan usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Efek kumulatif dari kendala-kendala ini adalah menurunnya produktivitas agregat dari ekonomi perkotaan dan kontribusinya terhadap kinerja makroekonomi.

Isyu kedua yang perlu mendapat perhatian adalah penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan. Seperti telah diuraikan di atas proses industrialisasi baru akan mengakibatkan polarisasi dan segmentasi struktur sosial. Khususnya untuk kelompok sosial yang tidak terlibat dalam proses itu dan tidak terjangkau oleh "pembangunan" diperlukan pendekatan khusus antara lain melalui program semacam PKT (pembangunan kawasan terpadu). Kawasan kumuh, kawasan yang sebagian besar rumah tangganya mengalami pengangguran tenaga kerja

yang tinggi, kawasan rawan bencana, adalah beberapa contoh untuk diberi prioritas dalam upaya menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui pendekatan pengembangan kawasan.

Isyu yang semakin perlu mendapat perhatian adalah yang berkenaan dengan krisis lingkungan hidup. Daerah perkotaan merupakan kontributor utama dalam masalah "global environment" karena tingginya intensitas penggunaan energi dan sumberdaya dan konsentrasi limbah dan emisi. Kalau dampak masalah lingkungan hidup global adalah jangka panjang, maka dampak lingkungan hidup perkotaan adalah jangka pendek, yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan produktivitas individu, rumah tangga, dan masyarakat sebagai akibat terjadinya kongesti, pencemaran udara dan sumber air, pembuangan limbah, sanitasi yang kurang, dan perusakan lahan marginal. Fokus perlu diberikan kepada masalah kemacetan lalu lintas dan spekulasi harga tanah, krisis air dan tenaga listrik di kota-kota yang berorientasi internasional (McCullough, 1990).

Kesimpulan

Peranan perdagangan internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat menentukan. Ekonomi yang berorientasi *outward* kelihatannya merupakan kondisi yang diperlukan, meskipun belum cukup untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan kombinasi intervensi pemerintah dan mekanisme pasar sebagai alat kompetisi dalam ekonomi dunia.

Pola baru industrialisasi terstruktur melalui perwujudan interaksi antara pemerintah, perusahaan multinasional beserta anak perusahaannya, dan adanya ekonomi informal. Pengaruh proses industrialisasi terhadap transformasi sosial-ekonomi dicirikan dengan polarisasi, dualisme dan fragmentasi sosial dan tataruang.

Semakin tergantung suatu masyarakat bangsa di dalam sistem internasional, semakin penting bagi masyarakat itu untuk bergabung dengan proses industrialisasi skala dunia untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan semakin besar pula biaya sosial dan biaya lingkungan hidup dari proses industrialisasi tersebut.

Pola baru industrialisasi beserta dampaknya dapat menimbulkan krisis legitimasi dan krisis manajemen bagi pemerintah. Isyu pembangunan politik perlu diperhatikan dalam menghadapi krisis legitimasi. Sedangkan isyu-isyu produktivitas perkotaan, penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan

perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijaksanaan perkotaan yang lebih eksplisit.

Sebagai catatan akhir, ada baiknya direnungkan dan dikaji apakah skenario pertumbuhan ekonomi tinggi melalui percepatan industrialisasi adalah satu-satunya alternatif yang diinginkan (*desirable*) untuk mengisi Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Apakah ada alternatif lain yang mencoba untuk mencari peluang-peluang baru yang inovatif yang tidak didikte oleh dominasi luar dan kebudayaan asing, yang lebih memperhatikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang tidak boros energi dan boros sumberdaya alam, sehingga yang tidak membawa kita ke arah katastrofi (Meier, 1991 dan Nagamine, 1991)□

Daftar Pustaka

- Amin, Samir (1974). *Accumulation on A World Scale: A Critique of The Theory of Underdevelopment*. New York: Monthly Review Press.
- Barnett, R.J. dan R.E. Muller (1974). *Global Reach: The Power of The Multinational Corporations*. New York: Simon & Schuster.
- BPS, (1991). *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 1990*.
- Bromley, R. (1978). *Introduction of the Urban Informal Sector: Why is it Worth discussing ?*, *World Development* 6:1033-39.
- Castells, Manuel (1989). *Social Dimensions of Industrialization in ASEAN Countries: An Analytical Framework*. *International Seminar on Industrializations and Development: Focus on Asean*. UNCRD & NIDA, Bangkok: 21-26 August 1989.
- Friedmann, J and C. Weaver (1979). *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*, University of California Press.
- Haruo, Nagamine (1991). *Japan's Redressed: Clues from the Grassroot of Third World*, May 1991. Economic Research Center, Faculty of Economics, Nagoya University.
- Lo, Fu-chen and Kamal Shalih (1975). *Rethinking Regional Development Policy: Transformation of Rural-Urban Relations in Asia*, Nagoya: UNCRD.
- Lowry, Kem (1990). *UNDP Urban Sector Projects in Indonesia: A Case Study*, Department of Urban and Regional Planning, University of Hawaii. March 15, 1990 (Draft).
- McCullough, James, et.al. (1990). *Urban Strategy Assistance: Indonesia*, Research Triangle Institute, March 1990 Prepared for USAID Mission to Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Meier, R.L. (1991). *The Perils of Mainstream Economic Development: with Indonesia in Mind*, June 1991 (first draft) mimeograph Univ. of California, Berkeley.
- Moon, U.C. dan H. Koo (1983). *Economic Development and Women's Work in A Newly Industrializing Country: The Case of Korea*, *Development and Change* 14: 515-31.
- NUDS Project (1985). *NUDS Final Report*, September 1985. DORP, DGHS, MOW-UNDS-UNCHS.
- Wallerstein, I. (1979). *The Capitalist World Economy*. Cambridge University Press.
- World Bank (1990). *Urban Policy and Economic Development: An Agenda for the 1990*. A World Bank Policy Paper.